FORMULIR DIALOG KINERJA

I Identitas Pegawai

NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	: Arik Dyah Rumsari, SE
2	NIP	: 19731207 199503 2 002
3	Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina (IV/a)
4	Jabatan	: Kepala Bidang Perindustrian
5	Unit Kerja	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

II Penjelasan Pohon Kinerja

NO	ULTIMATE OUTCOME PERANGKAT DAERAH	INTERMEDIATE/IMMIDIATE OUTCOME PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya daya saing industri	Meningkatnya produktivitas perindustrian	Nilai produksi sektor industri	6,738,600,000,000	Rupiah

III Sasaran dan Capaian Kinerja Pegawai

NO	RENCANA KINERJA ATASAN	NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	EKSPEKTASI PIMPINAN				
					KUANT	SATUAN	KUAL	WAKTU	BIAYA*
1	Meningkatnya produktivitas perindustrian	1.1	Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi	3.2	Persentase	100	12	
		1.2	Meningkatnya kualitas produk industri	Jumlah perencanaan dan evaluasi pembangunan industri	6	Dokumen	100	12	
		1.3	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	2.2	Persentase	100	12	
		1.4	Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Pengelolaan Data Dalam SIINas	4	Dokumen	100	12	
		1.5	Meningkatnya kepatuhan perizinan berusaha	Persentase kepatuhan perizinan berusaha	79	Persentase	100	12	
		1.6	Meningkatnya kepatuhan perizinan berusaha	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Ijin Usaha Industri di SIINas	7	Dokumen	100	12	

IV Penjelasan Capaian Indikator Kinerja

Penjelasan Rumusan Indikator Kinerja	(Jumlah produk yang bersertifikasi : Jumlah IKM yang ada) x 100%
	(Jumlah pertumbuhan IKM : Jumlah IKM yang ada) x 100%
	(Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan : Jumlah Izin Usaha industri (IUI) IKM di SIINas) x 100%

No	Intervensi Program Kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah		Target penyelesaian			
	Kinerja Kegiatan/ sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1		1
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			2	
3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1
4	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi		50		
		Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapatdiimplementasikan		2		
5	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	2	2	1
6	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis dataindustri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINas)		1		1
7	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas		1		1

V Penjelasan Rencana Aksi Capaian Hasil Kinerja

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Waktu Pelaksanaan
1	Dokumen penerapan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Bulan Januari s/d Desember 2025
2	Dokumen penerapan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Tribulan III 2025
3	Dokumen penerapan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Bulan Oktober s/d Desember 2025
4	Dokumen pelaksanaan jaminan produk halal	Tribulan II & III 2025
5	Dokumen laporan verifikasi penerbitan izin usaha industri (IUI)	Setiap pertribulan 2025
6	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan penerbitan izin usaha industri (IUI)	Setiap pertribulan 2025
7	Dokumen hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri	Setiap persemester 2025
8	Laporan penyediaan informasi industri	Setiap akhir tahun
9	Laporan pelaksanaan kegiatan kepatuhan pelaporan dan pengawasan izin usaha industri (IUI) melalui SIINas	Bulan Juni & Desember 2025

VI Pengelolaan Resiko Dalam Pencapaian Kinerja

No	Resiko	Rencana tindak pengendalian
1	Keterbatasan informasi dalam kepemilikan sarana dan prasarana produksi bagi IKM	Melakukan monitoring dan pengawasan dengan instansi terkait terhadap kepemilikan sarana dan prasarana produksi
2	Kurang respon dari pelaku usaha industri dalam mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas SDM	Meminta bantuan kepada pihak terkait dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait peningkatan produktifitas SDM berupa pelatihan atau bimbingan teknis
3	Pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi RPI selama 5 tahun belum dapat di manfaatkan secara maksimal	Bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri/swasta dalam penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan RPI kabupaten
4	Keterbatasan informasi/pengetahuan terkait pentingnya jaminan produk halal bagi pelaku usaha	Perlu adanya sosialisasi kepada IKM/pelaku usaha tentang pentingnya jaminan produk halal
5	Waktu yang diperlukan untuk kecukupan pemenuhan verifikasi teknis tidak dapat ditentukan	Adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan verifikasi teknis
6	Terbatasnya SDM yang melakukan analisis data industri dibanding jumlah industri seluruhnya	Diperlukan bimtek/pelatihan bagi SDM di bidang industri
7	Belum akuratnya informasi industri yang disajikan	Updating data dilakukan setiap bulan secara kontinyu
8	Pelaku usaha sebagai sumber informasi/responden kurang memahami istilah dalam form pendataan/dalam proses inventarisir data	Perlunya tim pendataan dalam memandu pelaku usaha dalam mengisi form pendataan
9	Kurang responnya pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan	Diperlukan koordinasi dengan pelaku usaha dalam memberikan pemahaman wawasan terkait kegiatan yang dilaksanakan
10	Peserta sosialisasi kepatuhan pengawasan bukan petugas yang berkompeten	Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan pada saat mengundang sosialisasi agar tepat sasaran

PESERTA DIALOG KINERJA		
a. N a m a	: Arik Dyah Rumsari, SE	
b. N I P	: 19731207 199503 2 002	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	: Pembina (IV/a)	
d. Jabatan	: Kepala Bidang Perindustrian	
e. Unit Organisasi	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk	
PEJABAT PENILAI		
a. N a m a	: Haris Jatmiko, S.Pd, M.Si	
b. N I P	: 19711219 199803 1 006	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	: Pembina Utama Muda (IV/c)	
d. Jabatan	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
e. Unit Organisasi	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk	